



KR-Sukro Riyadi

**CABAI LAHAN PASIR:** *Petani lahan pasir Dusun Patehan, Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, memanfaatkan penyemprot air untuk menjaga kelembaban tanaman cabai, Senin (12/7). Di kawasan Pesisir Selatan Bantul terdapat beragam komoditas sayuran sebagai penopang ekonomi masyarakat.*

## UNTUK KEBUTUHAN SATGAS COVID-19

# DPRD DIY Tengarai Ada RT Ditarik Rp 2 Juta

**YOGYA (KR)** - Sekretaris Komisi A DPRD DIY Retno Sudiyantri mengaku mendapatkan laporan adanya pengurus RT yang dimintai dana oleh kepala dukuh setempat. Dana tersebut katanya untuk kebutuhan Satgas Covid-19 di desanya.

"Saya mendapatkan laporan dari masyarakat di Banguntapan Bantul. Ada pengurus RT yang dimintai dana dan menyebutkan angka, yakni Rp 2 juta oleh kepala dukuh. Katanya uang itu untuk Satgas Covid-19, seperti pemulasaran dan yang lain," katanya ketika rapat kerja dengan Pemda DIY, Senin (12/7). Rapat dihadiri Sekda DIY K Baskara Aji, Kadinkes DIY dan Kasatpol PP. Sedangkan Kadinsos dan Kepala Pelaksana BPBD DIY hadir secara daring.

Padahal menurut Retno, selama ini masyarakat sudah secara sukarela bergotong royong memban-

tu warga yang harus isolasi mandiri (isoman). Seperti menyediakan makan, vitamin, masker dan lain sebagainya. "Tiba-tiba diminta dana sebesar Rp 2 juta. Ini bagaimana kebenarannya?" ungkapnya.

Retno juga mempertanyakan tentang ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di DIY. Kembali ia menyebutkan adanya laporan dari Kalurahan Purwomartani yang menghabiskan APD terutama untuk pemulasaran jenazah. Termasuk di Puskesmas Kalasan juga ada kendala di APD. "Setahu saya Pemda DIY sudah ada lelang APD, sampai saat ini sudah sejauh mana?

Stoknya bagaimana? Karena APD ini penting. Terutama untuk pemulasaran jenazah yang sangat berisiko tinggi. Jangan sampai justru muncul klaster pemulasaran. Ini tidak hanya terjadi di Purwomartani, tetapi juga di tempat lain," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Sekda DIY Baskara Aji menilai, jika itu sudah menjadi keputusan bersama di kecamatan dengan masyarakat, kemudian minta secara harus kepada masyarakat dalam rangka untuk penanganan. "Karena sifatnya gotong royong, tentu suka rela. Kalau tidak hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa mencakupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Misalnya, pemulasaran dan

lain-lain," ujarnya.

Untuk APD, Pemda DIY memang telah melakukan lelang sebanyak 1.000 pc. Tentu itu jumlah yang sangat kurang, mengingat perkembangan kasus infeksi Covid-19 cukup tinggi. Untuk itu perlu ada pengadaan lagi sesuai rencana saat menyusun anggaran 2021. "Waktu itu prediksi kita, karena sudah memasuki *new normal*, maka konsentrasi kita ke pemulihan ekonomi. Namun, ternyata di luar dugaan, yang terinfeksi makin hari bertambah. Bahkan sampai di atas 1.000 kasus. Saya kira perlu ada pengadaan APD lagi, karena kita masih memiliki dana BTT mungkin akan ditambah dari sana," tegasnya.

Untuk warga yang menjalani isoman, Sekda menjelaskan, sampai saat ini Pemda belum masuk ke sana. (Awh/Bro)-d

## PELANGGARAN ETIK WAKIL KETUA KPK Masuk Pemeriksaan Pendahuluan

**JAKARTA (KR)** - Pelaporan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas (Dewas), menurut anggota Dewas KPK Albertina Ho, sudah masuk tahap pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, Dewas juga sudah mengumpulkan bukti-bukti dan klarifikasi terhadap saksi-saksi.

"Pelaporan itu sudah masuk ke pemeriksaan pendahuluan sesuai hukum acara yang ada di dalam Peraturan Dewan Pengawas No 03 Tahun 2020. Jadi, sudah masuk di tahap pemeriksaan pendahuluan," jelas Albertina dalam jumpa pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLIC) Jakarta melalui akun Youtube KPK, Senin (12/7).

Terkait hal ini, lanjutnya, Dewas KPK sudah mengumpulkan bukti-bukti dan klarifikasi terhadap saksi-saksi. Untuk pemeriksaan ini sudah berlangsung. Begitu pula pengumpulan bukti-bukti dan klarifikasi sudah dilaksanakan. Nantinya, dari hasil pemeriksaan pendahuluan akan diputuskan apakah laporan tersebut dilanjutkan ke sidang etik atau tidak.

"Hasi dari semua itu juga akan disampaikan apakah itu dinyatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik atau dinyatakan tidak cukup bukti. Hal itu nanti ada hasil dari pemeriksaan pendahuluan," ungkapnya. (Ful)-d

## BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

**JAKARTA (KR)** - Bank Indonesia (BI) telah merevisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi sekitar 3,8 persen. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di kisaran 4,1 hingga 5,1 persen, dengan titik tengah 4,6 persen.

"Revisi proyeksi pertumbuhan ini sejalan dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada periode Juli ini. Namun berdampak pada penurunan mobilitas, khususnya konsumsi masyarakat," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (12/7).

Dikatakan Perry Warjiyo, berdasarkan kalkulasi asesmen awal pihaknya, menunjukkan pertumbuhan ekonomi di 2021 akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang titik tengahnya 4,6 persen. "Asesmen kami menunjukkan, jika PPKM Darurat dilakukan sebulan dan bisa menurunkan Covid-19 secara baik, maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun ke 3,8 persen," ujar Perry.

Menurutnya, BI akan terus melakukan antisipasi penurunan konsumsi masyarakat dikarenakan penerapan PPKM Daru-

rat. Tingkat inflasi pun menurutnya akan mencapai level yang rendah pada tahun ini, cenderung di bawah titik tengah sasaran BI sebesar 3 persen.

Perry menegaskan, BI akan terus mengarahkan instrumen kebijakannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi moneter, BI juga akan terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali merevisi target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 menjadi di kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen. Proyeksi Menkeu turun dari semula yang berada di kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen. Mantan petinggi Bank Dunia ini mengungkapkan, PPKM Darurat menjadi penyebab utama yang memicu perlambatan ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari sebelumnya itu dipengaruhi adanya penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali dalam rangka menekan lonjakan penularan Covid-19. Overall growth (pertumbuhan keseluruhan) pada 2021 ada di 3,7 persen-4,5 persen, karena pada Kuartal I-2021 tumbuhnya minus 0,7 persen. (Lmg)-d

## Direbranding, Koperasi Jadi Entitas Bisnis Modern

**JAKARTA (KR)** - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, sektor koperasi akan mengubah ulang citra atau rebranding menjadi sebuah entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif.

"Kami memiliki empat strategi pengembangan koperasi modern. Yakni, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan, pengembangan *factory sharing* dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok, pengembangan koperasi multi pihak, dan penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (*spin off* dan *split off*)," kata Teten di Jakarta, Senin (12/7).

Teten Masduki mengatakan, melalui Peringatan Puncak Hari Koperasi ke-74 pada Senin (12/7), Kemenkop UKM menggaungkan moto 'Untung Bareng Koperasi' sebagai semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kese-

jahteraan.

Dikatakan, saat ini koperasi di Indonesia sedang mengalami tiga disrupsi sekaligus. Pertama, disrupsi pandemi yang mengubah pola aktivitas dan munculnya norma baru. Kedua, disrupsi demografi dimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat struktur demografi didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi alfa dengan total populasi mencapai 64,69 persen. Ketiga, disrupsi teknologi atau era Revolusi Industri 4.0 dengan kemudahan akses teknologi.

Di sisi lain, Teten mengakui, koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini dilihat dari rendahnya partisipasi penduduk menjadi anggota koperasi masih 8,41 persen. "Kirakira masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31 persen meskipun ada juga yang tingkat partisipasinya tinggi seperti Provinsi NTT dan Kalimantan Barat," katanya.

Meski demikian, kata Teten, Kemenkop UKM terus berupaya untuk

mengembangkan sektor koperasi dengan sejumlah inovasi. Sedangkan amanat Undang Undang, program belanja Kementerian/Lembaga dengan proporsi sebesar 40 persen untuk UMKM.

Selain itu, pemanfaatan fasilitas infrastruktur publik, seperti rest area, bandara, pelabuhan, stasiun, mal dan infrastruktur publik lainnya sebesar 30 persen juga untuk UMKM. "Koperasi Simpan Pinjam atau Credit Union perlu melakukan transformasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif. Tidak hanya itu, KSP atau CU juga harus melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha," ujarnya.

Teten mengaku, saat ini berbagai masalah atau kasus koperasi muncul karena kelalaian, salah kelola, maupun praktik koperasi bodong. Diperlukan pengecekan koperasi melalui sistem ODS dan NIK atau konfirmasi ke Kementerian maupun Dinas KUMKM, serta pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. (Ant/San)-d

### GERAKAN ZISWAF

## Bantu Warga Terdampak Pandemi

**JAKARTA (KR)** - Pandemi Covid-19 berdampak bagi kehidupan umat, tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi juga ekonomi, pendidikan dan lainnya. Pandemi bahkan bisa berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi pada Diskusi Bulanan Yayasan Pesantren Tashwirul Afkar di Jakarta, Senin (12/7). Menurutnya, penduduk yang bergantung dengan penghasilan harian dan tidak punya tabungan harus diselamatkan dari bibir jurang kemiskinan dan frustrasi sosial.

"Peran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) yang dikelola secara terlembaga oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di samping membantu darurat medis, diharapkan secara maksimal membantu rakyat kecil agar bisa memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli yang tertekan akibat pandemi Covid-19," kata Wamenag.

Dikatakan Wamenag, Program Stimulus Ekonomi serta Jaring Pengaman Sosial yang disiapkan Pemerintah, memerlukan dukungan dan partisipasi berbagai pihak, termasuk Baznas, LAZ dan BWI. Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. (Ati)-d

### YOGYA (KR)

- Antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 meningkat, setelah pemerintah meningkatkan pasokan vaksin. Selain itu, dibuka kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksin, menambah keinginan masyarakat untuk segera mengikuti program vaksinasi tersebut.

Melihat kenyataan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY, M Afnan Hadikusumo mengingatkan, pemerintah hendaknya membatalkan rencana meluncurkan kebijakan vaksin berbayar. "Kebijakan vaksin berbayar di saat pandemi ini, bisa menimbulkan pemerintah berbisnis dengan rakyat," ujar cucu tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo kepada KR, Senin (12/7).

Afnan mengakui pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk menangani wabah covid 19 yang saat ini angka penularannya makin meninggi. "Kita tentu sangat prihatin dengan keadaan ini



KR-Primaswolo S

**Proses pendataan peserta vaksinasi Covid-19 gratis.**

sekalius memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan serta relawan yang tiada henti memberikan pelayanan bagi korban Covid-19. Terhadap penanganan ini, Afnan memberikan catatan.

Pertama, masih masuknya war-

ga negara asing ke Indonesia di tengah wabah yang makin menggila ini sementara perjalanan bagi warga dibatasi dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah pusat.

Kedua, kelangkaan oksigen, obat-obatan tertentu, serta melambungnya harga kebutuhan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dari pemerintah dalam mengatasi wabah dengan skema yang paling pahit.

Ketiga, penetapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa diikuti dengan pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi kelas menengah yang menjadi korban PHK, atau pemilik unit usaha yang dilarang buka, serta kelompok rentan, akan menciptakan ketidakpuasan dari masyarakat.

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, maka sudah saatnya pemerintah menyusun skema penanggulangan wabah sampai pada keadaan yang sangat kritis.

"Sementara ini stop para WNA dari negara sumber penularan wabah. Berikan bantuan bagi warga yang terpuruk usahanya, korban PHK, serta kelompok rentan," desak Afnan. (Jon)-d